SISTEM PEMERINTAHAN KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (KRIS)

Nama : Sandi Pratama

Email : Sandpratama241@gmail.com

No BP : 1910003600193

Perguruan Tinggi : Universitas Ekasakti

A. Pendahuluan

I. Latar Belakang

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, sempat terjadi perubahan bentuk konstitusi. Perubahan ini terjadi ketika Indonesia masih mengalami pergolakan pasca kemerdekaan. Perubahan ini menjadikan Indonesia yang sebelumnya merupakan negara kesatuan, menjadi negara federal layaknya sistem konstitusi negara Barat. Terdapat berbagai pro dan kontra ketika perubahan bentuk konstitusi ini terjadi, oleh karena itu pembahasan ini akan secara khusus memaparkan sejarah terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) hingga berakhirnya sistem RIS.

Perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia diselesaikan dengan perundingan di Den Haag pada paruh kedua tahun 1949. Perkembangan dalam perundingan-perundingan ini memperlihatkan langkah-langkah lebih progresif dari gagasan-gagasan van Mook sebelumnya, yang telah dipecat dari jabatannya sebagai penguasa tertinggi di *Bijeenkomst voor Federaale Overleg* (Musyawarah Negara-Negara Federal atau biasa disingkat BFO). Sebelum melangkah ke forum internasional, wakil-wakil RI berunding dua kali dengan wakil-wakil BFO di Yogyakarta (22 Juli 1949), dan Jakarta (1 Agustus 1949). Mereka sepakat mengenai

aspek-aspek terpenting dalam usaha menciptakan suatu sistem politik baru. Perundingan itu kemudian dilanjutkan ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, KMB digelar pada 23 Agustus 1949, ketika itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta, sementara BFO dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung. Pada konferensi tersebut, dibentuk komisi-komisi yang membahas berbagai aspek dalam rangka serah terima dari Belanda pada Republik Indonesia Serikat, serta persiapan pembentukan Uni Indonesia Belanda.

II. Rumusan masalah

Bagaimana system pemerintahan kesatuan republik Indonesia serikat (KRIS)?

B. Pembahasan

Alasan saya memilih tulisan ini adalah karna saya ingin mengetahui bagaimana system pemerintahan RIS itu di Indonesia, dan bagaimana sejarah terbentuknya system RIS di Indonesia

a. Latar Belakang Terbentuknya RIS

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, sempat terjadi perubahan bentuk konstitusi. Perubahan ini terjadi ketika Indonesia masih mengalami pergolakan pasca kemerdekaan. Perubahan ini menjadikan Indonesia yang sebelumnya merupakan negara kesatuan, menjadi negara federal layaknya sistem konstitusi negara Barat. Terdapat berbagai pro dan kontra ketika perubahan bentuk konstitusi ini terjadi, oleh karena itu pembahasan ini akan secara khusus memaparkan sejarah terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) hingga berakhirnya sistem RIS. Perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia diselesaikan dengan perundingan di Den Haag pada paruh kedua tahun 1949. Perkembangan dalam perundingan-

perundingan ini memperlihatkan langkah-langkah lebih progresif dari gagasan-gagasan van Mook sebelumnya, yang telah dipecat dari jabatannya sebagai penguasa tertinggi di *Bijeenkomst voor Federaale Overleg* (Musyawarah Negara-Negara Federal atau biasa disingkat BFO).

Sebelum melangkah ke forum internasional, wakil-wakil RI berunding dua kali dengan wakil-wakil BFO di Yogyakarta (22 Juli 1949), dan Jakarta (1 Agustus 1949). Mereka sepakat mengenai aspek-aspek terpenting dalam usaha menciptakan suatu sistem politik baru. Perundingan itu kemudian dilanjutkan ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, KMB digelar pada 23 Agustus 1949, ketika itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta, sementara BFO dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung. Pada konferensi tersebut, dibentuk komisi-komisi yang membahas berbagai aspek dalam rangka serah terima dari Belanda pada Republik Indonesia Serikat, serta persiapan pembentukan Uni Indonesia Belanda.

Ketika KMB berlangsung, Konferensi Inter-Indonesia juga dilangsungkan di Belanda untuk merumuskan konstitusi Republik Indonesia Serikat, sebagai tindak lanjut perundingan di Yogyakarta, dan Jakarta. Tanggal 29 Oktober 1949, piagam persatuan RIS berhasil ditandatangani di Scheveningen oleh 16 perwakilan masing-masing wakil negara bagian dan daerah otonom. Akhirnya, setelah perundingan alot selama lebih dari dua bulan, KMB berakhir pada 2 November 1949. Dengan disetujuinya KMB pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Hasil KMB salah satunya menyebutkan kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada RIS dengan tidak bersyarat lagi dengan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Dari hasil tersebut, banyak kalangan menilai, hasil KMB sangat menyimpang dari gerakan kebangsaan dan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang tidak menginginkan kemerdekaan sebagai hadiah. Yang dituntut sebenarnya adalah pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, bukan penyerahan kedaulatan. Hal ini diperparah dengan kewajiban Indonesia membayar hutang Hindia-Belanda sebesar 6, 5 milyar gulden, sebelum akhirnya disepakati menjadi 4, 5 milyar gulden.

b. Terbentuknya RIS

Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Di antara negara-negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang memiliki luas daerah dan jumlah penduduk terbanyak, ialah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, dan Negara Indonesia Timur. Tanggal 14 November 1949, rombongan delegasi Indonesia di bawah pimpinan Mohammad Hatta tiba kembali di Yogyakarta. Hasil dari KMB perlu diratifikasi oleh semua negara dan daerah otonom yang menjadi anggota RIS, dalam hal ini oleh pemerintah Indonesia Indonesia, dan semua negara-negara federal bentukan van Mook.

Pada tanggal 14 November 1949 di Jakarta, wakil dari semua anggota BFO dan pemerintah Indonesia menandatangani konstitusi RIS. Sementara itu, sejak awal Desember 1949 di Yogyakarta KNIP mulai membahas hasil KMB. Ketika sidang pleno KNIP, banyak anggota yang sadar pembentukan RIS sebenarnya adalah penyelewengan terbesar proklamasi kemerdekaan. Meskipun demikian, KNIP menyadari tidak ada jalan lain, selain menerima segala naskah yang dibuat oleh KMB di Den Haag. Ditambah naskah konstitusi RIS, yang tidak dapat dirubah

sediki pun. Sehingga mereka hanya harus menerima dan mengesahkan saja. KNIP juga harus memilih seorang wakil bagi setiap 12 anggota KNIP, untuk duduk dalam dewan perwakilan RIS.

Setelah satu minggu bersidang, diambil pemungutan suara untuk pengesahan seluruh hasil KMB dengan hasil, 236 suara menerima, dan 62 suara menolak hasil KMB. Taggal 15 Desember 1949, KNIP meratifikasi hasil-hasil KMB. Selain menunjuk wakil-wakil untuk duduk di Senat RIS, KNIP juga menunjuk wakil-wakil Indonesia untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat RIS. Sama halnya dengan negara-negara anggota BFO, yang mengirim wakil untuk duduk di Senat dan DPR RIS. Pada tanggal 16 Desember 1949 di Yogyakarta, Panitia Pemilihan Nasional RIS memilih Soekarno menjadi presiden Indonesia Serikat pertama, dan peresmianya dilakukan tanggal 17 Desember 1949. KNIP kemudian mengangkat Mr. Assaat Datuk Mudo, ketua KNIP, sebagai pemangku jabatan Presiden Indonesia. Dengan demikian, MR. Assaat de facto presiden Indonesia kedua yang memegang jabatan ini hingga dibubarkannya RIS pada tanggal 17 Agustus 1950.

DPR RIS kemudian memilih empat orang menjadi formatur kabinet, yaitu Mohammad Hatta, Anak Agung Gde Agung, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Sultan Hamid II. Pada 19 Agustus 1949 terbentuk lah kabinet RIS dengan susunan:

Perdana Menteri :Mohammad Hatta

Menteri Luar Negeri :Mohammad Hatta

Menteri Pertahanan :Hamengku Buwono IX

Menter Dalam Negeri :Ide Anak Agung Gde Agung

Menteri Keuangan : Syafruddin Prawiranegara

Menteri Perekonomian : Ir. Juanda

Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum : Ir. H. Laoh

Menteri Kehakiman : Prof. Dr. Mr. Soepomo

Menteri P dan K : dr. Abu Hanifah

Menteri Kesehatan : dr. Josef Leimena

Menteri Perburuhan : Mr. Wilopo

Menteri Sosial : Mr. Kosasih Purwanegara

Menteri Agama : K. H. Wahid Hasyim

Menteri Penerangan : Arnold Mononutu

Kabinet ini merupakan *Zaken Kabinet* (mengutamakan keahlian dari anggota-anggotanya), dan bukan kabinet koalisi yang bersandar pada kekuatan partai-partai politik. Upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia Serikat berlangsung bersamaan di dua tempat. Pada 27 Desember 1949 di *Paleis op de Dam* di Amsterdam, Belanda. Perdana menteri RIS Mohammad Hatta atas nama pemerintah RIS, menerima kedaulatan dari Ratu Juliana, dan di Jakarta, Wakil Perdana Menteri RIS, Hamengku Buwono IX menerima kedaulatan RIS dari wakil tinggi mahkota Belanda, A. H. J. Lovink.

c. Permasalahan yang dihadapi RIS

Pada masa sistem pemerintahan federal ini, kabinet Hatta disibukkan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul akibat perang kemerdekaan maupun masalah-masalah yang intern dengan kehidupan suatu negara muda.

Sebagai akibat dari perang kemerdekaan banyak prasarana yang hancur, keadaan ekonomi yang buruk, dan terdapat pula kerusakan mental di masyarakat. Di bidang ekonomi sendiri masalah utama adalah munculnya inflasi dan defisit dalam anggaran belanja. Untuk mengatasi masalah inflasi, pemerintah menjalankan suatu kebijakan dalam bidang keuangan yaitu mengeluarkan peraturan pemotongan uang pada tanggal 19 Maret 1950, yang dikenal dengan kebijakan gunting Syafruddin. Peraturan ini menentukan bahwa uang yang bernilai 2, 50 gulden atau Rp. 5 ke atas dipotong menjadi dua, sehingga nilainya tinggal setengah.

Meskipun banyak pemilik uang yang terkena dampak peraturan ini, tetapi pemerintah mulai dapat mengendalikan inflasi agar tidak cepat meningkat. Di samping soal keuangan ini, ekonomi juga dapat diperbaiki, karena dengan meletusnya Perang Korea, perdagangan ke luar negeri meningkat, terutama untuk bahan mentah seperti karet. Dengan meningkatnya ekspor, maka pendapatan negara juga ikut meningkat. Masalah utama lain terdapat di bidang kepegawaian, baik sipil maupun militer. Setelah selesainya perang, jumlah pasukan harus dikurangi karena keuangan negara yang tidak mendukung. Mereka perlu mendapat penampungan bila pemerintah ingin melakukan program rasionalisasi. Untuk itu pemerintah membuka kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya dalam pusat latihan yang memberi pendidikan keahlian untuk memberi mereka kesempatan menempuh karier sipil profesional. Selain itu usaha transmigrasi juga dilakukan, meskipun demikian masalah kepegawaian belum dapat diselesaikan pemerintah RIS.

Dalam pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) intinya diambil dari TNI, sedangkan lainnya dari kalangan bekas anggota KNIL. Personil KNL yang akan dilebur ke dalam APRIS meliputi 33.000 orang dengan 30 perwira.

Pembentukan APRIS menimbulkan kegoncangan psikologis bagi TNI. Di satu pihak TNI keberatan untuk bekerjasama dengan bekas musuh. Sebaliknya dari pihak KNIL terdapat tuntutan untuk ditetapkan sebagai aparat negara bagian, dan menolak masuknya TNI di negara tersebut. Gejala semacam ini tentunya menimbulkan konflik baru di dalam negeri, contohnya di Bandung berupa gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang mengirimkan ultimatum kepada Pemerintah RIS, dan Negara Pasundan serta menuntut diakui sebagai tentara Pasundan dan menolak pembubaran negara tu.

Sementara itu, di Kalimantan Barat Sultan Hamid menolak masuknya TNI serta menolak untuk mengakui menteri pertahanan RIS dan menyatakan bahwa dia yang berkuasa di daerah tersebut. Di Makassar muncul gerakan Andi Aziz di Ambon, dengan nama gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Keadaan ini sengaja diwariskan oleh kekuatan reaksioner Belanda, dengan tujuan mempertahankan kepentingan dan membuat kondisi RIS kacau. Jika usaha ini berhasil, maka dunia Internasional akan menganggap RIS tidak mampu memelihara keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Selain disibukkan dengan suasana nasional yang tidak stabil akibat bom waktu yang sengaja ditinggalkan pihak kolonialis, pemerintah masih harus menghadapi pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo.

d. Kemabali kebentuk Negara kesatuan

Wacana kembali ke dalam bentuk negara kesatuan dimulai oleh keinginan Negara Indonesia Timur (NIT), dan pemerintah Negara Sumatra Timur (NST), yang menyatakan keinginannya untuk bergabung kembali ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada 8 April 1950 diadakan konferensi segitiga antara RIS-NIT-NST. Akhirnya, tanggal 12 Mei 1950 Kedua negara bagian tersebut memberikan mandatnya kepada perdana menteri RIS, Mohammad Hatta, untuk mengadakan pembicaraan mengenai pembentukan negara kesatuan dengan pemerintah RI. Sementara itu, rakyat di negara-negara bagian umumnya juga menuntut agar wilayahnya dikembalikan kepada Republik Indonesia, seperti yang dilakukan rakyat Jawa Barat pada 8 Maret 1950. Mereka berbondong-bondong melakukan demonstrasi di Bandung menuntut pembubaran Negara Pasundan, dan seluruh wilayahnya dikembalikan ke dalam RI.

Kesepakatan antara RIS dan RI (sebagai negara bagian) untuk membentuk negara kesatuan tercapai pada tanggal 19 Mei 1950. Setelah dua bulan bekerja, Panitia Gabungan RIS dan RI yang bertugas merancang UUD Negara Kesatuan berhasil menyelesaikan tugasnya pada tanggal 19 Mei 1950. Setelah itu diadakan pembahasan di masing-masing DPR, rancangan UUD negara kesatuan itu pun diterima dengan baik oleh Senat, Parlemen RIS, dan KNIP. Tanggal 17 Agustus 1950, bertepatan dengan momen kemerdekaan, presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD tersebut yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950).

UUDS sendiri mengandung unsur-unsur dari UUD 1945 dan undang-undang dari konstitusi RIS. Menurut UUDS 1950, kekuasaan legislatif dipegang oleh presiden, kabinet, dan DPR. Pemerintah mempunyai hak untuk mengeluarkan undang-undang darurat atau peraturan pemerintah, meskipun pada perkembangannya harus disahkan terlebih dahulu oleh DPR. Selain itu kabinet

secara keseluruhan atau perseorangan, masih bertanggung jawab kepada DPR, yang mempunyai hak untuk menjatuhkan kabinet atau memberhentikan menteri. Dengan ditandatanganinya rancangan UUDS, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi RIS dibubarkan, dan dibentuk kembali negara kesatuan yang diberi nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

C. Kesimpulan

Perkembangan dalam perundingan-perundingan ini memperlihatkan langkah-langkah lebih progresif dari gagasan-gagasan van Mook sebelumnya, yang telah dipecat dari jabatannya sebagai penguasa tertinggi di *Bijeenkomst voor Federaale Overleg* (Musyawarah Negara-Negara Federal atau biasa disingkat BFO). Ketika KMB berlangsung, Konferensi Inter-Indonesia juga dilangsungkan di Belanda untuk merumuskan konstitusi Republik Indonesia Serikat, sebagai tindak lanjut perundingan di Yogyakarta, dan Jakarta. Tanggal 29 Oktober 1949, piagam persatuan RIS berhasil ditandatangani di Scheveningen oleh 16 perwakilan masing-masing wakil negara bagian dan daerah otonom.

Pada 19 Agustus 1949 terbentuk lah kabinet RIS dengan susunan:

Perdana Menteri	:Mohammad Hatta
Menteri Luar Negeri	:Mohammad Hatta
Menteri Pertahanan	:Hamengku Buwono IX
Menter Dalam Negeri	:Ide Anak Agung Gde Agung
Menteri Keuangan	:Syafuruddin Prawiranegara

Menteri Perekonomian : Ir. Juanda

Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum : Ir. H. Laoh

Menteri Kehakiman : Prof. Dr. Mr. Soepomo

Menteri P dan K : dr. Abu Hanifah

Menteri Kesehatan : dr. Josef Leimena

Menteri Perburuhan : Mr. Wilopo

Menteri Sosial : Mr. Kosasih Purwanegara

Menteri Agama : K. H. Wahid Hasyim

Menteri Penerangan : Arnold Mononutu

Daftar Pustaka

Andrew Shandy Utama, *Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3312.

Annisa Arifka, *Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3745.

Ade Sarmini, *Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Karimun*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4231.

Bram Mohammad Yasser, *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana*

Korupsi, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3558.

Danel Aditia Situngkir, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3398.

Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>.

Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia*, Ius Quia Iustum Law Journal, Volume 25, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>.

Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa*, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.

Debora Angelia Pardosi, *Peran Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Peningkatan Kinerja Birokrat Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3718.

Dewi Fiska Simbolon, *Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2017, <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3310>.

Dian Bakti Setiawan, *Keberadaan Dan Penerapan Peraturan Daerah Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3327.

Dila Andika Azhar, *Analisis Yuridis Terhadap Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Notaris Pada Proses Pengikatan Jual Beli (Pjb) (Analisis*

- Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/Pn.Bkt*), Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3557.
- Dola Riza, *Hakikat KTUN Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-undang Administrasi Pemerintahan*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.3566.
- Fadlan, *Perkembangan Kebijakan Daerah Sebagai Paradigma Dasar Untuk Penentuan Kebijakan Mengelola Potensi Keberagaman*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3347.
- Ferdian, *Lelang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dirampas Oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3564.
- Hasnati, *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Terjadinya Kredit Macet Pada Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3319.
- Hendra Sudrajat, Beggy Tamara, *Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3713.
- Idham, *Pendaftaran Tanah Dan Penerbitan Sertipikat Dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ) Di Kampung Tua, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3908.
- Jasmir, *Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3384.

- Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Anak (Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri Dan Bahaya LGBT Bagi Regenerasi Bangsa)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Laurensius Arliman S, Gokma Toni Parlindungan S, *Politik Hukum Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan KPAI dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan - Tantangan Warga Negara Milenial Menghadapi Revolusi Industri 4.0*, Yogyakarta, 2019.
- Laurensius Arliman S, *Protection of Girls from the Dangers of Sexual Violence in Indonesia to Design Sustainable Child Protection*, Proceedings 1st Bicoshs (Prophetic Role of Sharia Knowledge in Developing Social Justice), 2017.
- Laurensius Arliman S, Debora Angelina Carissa Pardosi, *Peran Badan Pengawas Pemilu untuk Mengisi Kekosongan Hukum Eksploitasi Anak dalam Pelaksanaan Kampanye*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 2, 2018, <https://doi.org/10.15294/snh.v4i02.25600>.
- Laurensius Arliman S, Danel Situngkir, Rianda Putri, Rahmat Fauzi, Hariyadi, Gokma Toni Parlindungan S, *Cyber Bullying Against Children In Indonesia*, International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law; Padang, 2018. DOI:10.4108/eai.5-9-2018.2281372.
- Laurensius Arliman S, *Penelantaran Perlindungan Anak Oleh Orangtua Akibat Gaya Hidup Modernisasi Yang Salah Arah*, Konferensi Nasional Sosiologi V, Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia, Volume 5, Padang 18-19 Mei 2017.

- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Bisnis Ditinjau Dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *Lex Jurnalica*, Volume 16, Nomor 3, 2019.
- Laurensius Arliman S, *Analisis Dari Perspektif Politik Hukum Terhadap Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, *Lex Jurnalica*, Volume 15, Nomor 3, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Volume 15, Nomor 2, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hak Anak Di Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Volume 15, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hak Anak Yang Berhadap Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Sawahlunto*, *Lex Jurnalica*, Volume 14, Nomor 2, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Perlindungan Hak Anak Yang Bekelanjutan Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Volume 14, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 6, Nomor 3, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum*, *Padjadjaran Journal of Law*, Volume 3, Nomor 2, 2016. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>.
- Laurensius Arliman S, *Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, *Supremasi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102>.
- Laurensius Arliman S, *Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi*, *UIR Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2018 <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1437>.

- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang*, Jurnal Arena Hukum, Volume 9, Nomor 1, 2016, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.5>
- Laurensius Arliman S dan Hariyadi, *Peran Orangtua Dalam Mengawasi Anak Dalam Mengakses Media Internet Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Anak*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3716>.
- Laurensius Arliman S, *Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20, Nomor 2, 2018, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10081>.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara*, Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi, Volume 5, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754>.
- Laurensius Arliman S, *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia*, Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 2, 2018, <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>.
- Laurensius Arliman S, *Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Yustisia, Volume 22, Nomor 1, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia*, Jurnal Lex Librum, Volume 5, Nomor 1, 2018, <http://doi.org/10.5281/zenodo.1683714>.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Anak Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Mazhab Sejarah Di Dalam Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child Pada Kehidupan Anak Di Indonesia*, Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 1, 2017, <http://dx.doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.668>.

- Laurensius Arliman S, *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran*, Volume 8, Nomor 2, 2015, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.1>
- Laurensius Arliman S, *Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2015,
- Laurensius Arliman S, Imelda Tamba, Maria Florida Bunga Makin, *Kualitas Pelayanan Sdm Mempengaruhi Kepuasan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Jembatan Kasih Kp Tanjung Uncang Di Kota Batam*, Jurnal Marketing, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Fungsi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, Volume 1, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah Di Indonesia*, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 24, Nomor 1, Mei 2016, DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ws.2016.24.1.676>.
- Laurensius Arliman S, *Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*, UIR Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.153>
- Laurensius Arliman S, *Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*, Cendekia Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2019, <http://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>.
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat di Daerah Perbatasan NKRI untuk Mencegah Anak Sebagai Objek Human Trafficking*, Wawasan Yuridika, Volume 2, Nomor 1, 2018, <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v2i1.162>.

- Laurensius Arliman S, *Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia*, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, *Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional*, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, *Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai State Auxialiary Bodies Yang Menjamin Siaran Yang Layak Bagi Anak*, Veritas et Justitia, Volume 3, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.25123/vej.2528>.
- Laurensius Arliman S, *Partispasi Pemerintah Daerah Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia*, Jurnal Yuridika, Volume 30, Nomor 3, 2015, <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1770>.
- Laurensius Arliman S, *Peran Dewan Pers Sebagai Lembaga Negara Independen Yang Menjamin Berita Yang Layak Bagi Perlindungan Anak*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 4, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.4972>.
- Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial Kajian Putusan Nomor 267/Pid. B/2015/PN. Blg*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 01, Nomor 1, 2019,
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Agama Melalui Konten Video Melalui Media Sosial*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 01, Nomor 1, 2019.

- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Anak dalam Proses Penyidikan di Polresta Padang*, Jurnal Ijtihad, Volume 31, Nomor 2, 2015, <http://dx.doi.org/10.15548/ijt.v31i2.63>,
- Laurensius Arliman S, Yulfasni, *Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan Good Corporate Governance dalam Rangka Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Pemegang Saham*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 3, Nomor 1, 2019.
- Laurensius Arliman S, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Bentuk Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia*, Kosmik Hukum, Volume 19, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4081>.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, *Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Bagi Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya*, Dialogica Jurnalica, Volume 9, Nomor 2, 2018, <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.976>.
- Laurensius Arliman S, *Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587).
- Laurensius Arliman S, *Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-undang Kejaksaan*, Jendela Hukum dan Keadilan, Volume 5, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*, Justicia et Pax, Volume 34, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.24002/jep.v34i1.1652>.
- Laurensius Arliman S, *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional*, Cendikia Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2018, <http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.18>.

- Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Justitia et Pax, Volume 32, Nomor 2, 2016, <https://doi.org/10.24002/jep.v32i2.1151>.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Sudbit Keamanan Dengan Subdit Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Barat*, Journal of Islamic and Law Studies, Volume 3, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.18592/jils.v3i2.3237>.
- Laurensius Arliman S, *Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak dalam Rangka Mewujudkan Generasi yang Bebas Korupsi*, Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, Volume 17, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i1.1348>.
- Laurensius Arliman S, *Dinamika Dan Gagasan Mencegah Eksploitasi Anak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Jurnal Jentera, Volume 1, Nomor 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Salah Satu Wujud Tujuan Bela Negara*, Respublica, Volume 17, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1453>.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, Justicia Islamica, Volume 14, Nomor 2, 2017, <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i2.1228>.
- Laurensius Arliman S, *Hukum Pidana Sebagai Landasan Penegakan Hukum Oleh Penegak Hukum Di Indonesia*, Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan, Volume 4, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang*

Berkelanjutan, Syiar Hukum, Volume 15, Nomor 2, 2017, <https://doi.org/10.29313/sh.v15i2.2857>.

Laurensius Arliman S, *Undang-undang 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum Positum, Volume 1, Nomor 2, 2017, <http://dx.doi.org/10.35706/positum.v1i2.846>.

Laurensius Arliman S, *Hak Atas Pengadaan Dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia*, Jurnal Yuridis, Volume 4, Nomor 1, 2017, <http://dx.doi.org/10.35586/.v4i1.131>.

Laurensius Arliman S, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Dari Sudut Pandang Penyelesaian Kasus Dan Kelemahannya*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 1, 2017.

Laurensius Arliman S, *Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Justicia et Pax, Volume 32, Nomor 1, 2016, <https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.758>.

Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplorasi Secara Ekonomi Di Kota Padang*, Arena Hukum, Volume 9, Nomor 1, 2016, <https://doi.org/10.25123/vej.2076>.

Laurensius Arliman S, *Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran*, Volume 8, Nomor 2, 2015, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.1>.

Laurensius Arliman S, *Bolehkan Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal Melalui Media Internet?* Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik), Volume 2, Nomor 1, 2016, <https://doi.org/10.35814/selisik.v2i1.638>.

Laurensius Arliman S, *Hak Ingkar (Verschoningsplicht) Atau Kewajiban Ingkar (Verschoning Splicht) Notaris Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Doctrinal, Volume 1, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, *Partisipasi Aktif dan Pasif Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Payakumbuh*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2015.

Laurensius Arliman S, *Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Volume 2, Nomor 2, 2015.

Laurensius Arliman S, *Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Padang Sidempuan*, Jurnal Al Adalah, Volume 12, Nomor 4, 2015.

Laurensius Arliman S, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perubahan Undang Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris*, Jurnal Respublica, Volume 16, Nomor 1, 2016, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1427>.

Laurensius Arliman S, *Wacana Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana atau GBHN sebagai Landasan Pembangunan Negara Berkelanjutan*, Jurnal Manajemen Pembangunan, Volume 3, Nomor 3, 2016.

Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.

Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Harmonisasi Lembaga Negara Independen Terhadap Konsep Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan*, Jendela Hukum dan Keadilan, Volume 3, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, *Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak, Istimbath*, Volume 3, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, *Penyelenggaraan Sistem Presidensial Berdasarkan Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Muhakamah, Volume 4, Nomor 2, 2019.

Melki, *Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, [10.22216/soumlaw.v1i1.3385](https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3385).

- Muhammad Afif, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3714.
- Miszuarty Putri, *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3567.
- Muhamad Rasyad, *Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Di Kabupaten Agam*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3569.
- Muhammad Taufiqurrahman, *Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4341.
- Mardalena Hanifah, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 10.22216/soumlaw.v2i2.4420.
- Okny Nasrul, *Pemanfaatan Tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat Oleh Pihak Ketiga*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3554.
- Rahmat Fauzi, *Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3395.
- Rahmat Fauzi, Faisal, *Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Study Di Pengadilan Agama Bukittinggi Dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015-2017)*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3722.
- Rahmat Riardo, *Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Kota Solok*,

Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.3566.

Rianda Prima Putri, *Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3348.

Ridwan Putra, *Prospek Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat Dalam Koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3529.

Rustan Sinaga, *Peran Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3528.

Ratih Agustin Wulandari, *Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.3568.

Rusmilawati Windari, *Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global - Local Based Approach (Glocalization)*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4369.

Sayid Anshar, *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4136.

Sandra Dewi, *Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3744.

Tommy Busnarma, *Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3559.

Wahyudi, *Tanggungjawab Hukum Apoteker dalam Pemusnahan Obat Narkotika di Rumah Sakit*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 10.22216/soumlaw.v2i2.4484.

Yasmirah Mandasari, *Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4339.

Yohanis, *Perkawinan Poligami Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang (Mekanisime Pemberian Izin, Dasar Hukum, Syarat-Syarat Poligami Dan Pelaksanaanya)*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3403.